

Stok Komoditas di Kota Tangerang Jelang Ramadan Dijamin Aman

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Disperindagkopukm memastikan stok bahan pokok menjelang Ramadan 2021 aman, meski harga mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan.

“Untuk stok masih aman dari mulai bahan pokok dan bahan penting dari mulai sembako, sayuran dan sebagainya aman,” ujar Kabid Perdagangan Disperindagkopukm Kota Tangerang Eni Nuraeni setelah sidak di Pasar Anyar Kota Tangerang, Selasa (6/4).

Eni menyebut, stok ketersediaan komoditas di Kota Tangerang tetap aman karena keberadaan Pasar Induk Tanah Tinggi. “Karena kita diuntungkan punya Pasar Induk. Artinya untuk pasokan selalu ada, paling kendalanya hanya telat-telat dikit seperti akibat hujan,” katanya.

Harga bahan pokok juga stabil meskipun ada beberapa bahan yang mengalami kenaikan tetapi tidak drastis. “Kalau untuk harga masih stabil hanya ada beberapa komoditi yang naik seperti ayam, telur, cabai ada yang naik dan turun. Cabai domba yang naik terus, cabai merah gede agak naik dari Rp60 ribu jadi Rp70 ribu,” ungkapnya.

Dijelaskan Eni, kenaikan harga bahan pokok yang masih dikategorikan stabil ini merupakan hal yang wajar karena momentum menjelang Ramadan 2021. “Sebetulnya kita ini momen menjelang bulan Ramadan itu kan biasa, kalau momen sika terjadi kenaikan. Tapi biasanya setelah bulan puasa itu harga stabil. Nanti baru momen lagi mau Lebaran akan ada kenaikan lagi,” ucapnya.

Adapun keluhan disampaikan pedagang daging karena lambatnya pengiriman daging impor dari Australia serta terbatasnya ketersediaan daging lokal. “Jadi, keluhannya itu pedagang menjualnya agak sulit. Mau dinaikkan nanti enggak laku, karena mereka banyak yang untuk UMKM juga seperti untuk bakso dan soto. Akhirnya mereka mensiasatinya asal terjual laku meski untungnya tipis,” tutur Eni.

Guna menindaklanjuti keluhan pedagang tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan instansi terkait. “Kami koordinasi dengan Kemendag dan Bulog jika terjadi kelangkaan maka kita harus operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, tapi tadi sidak selama ini masih aman terkendali,” tuturnya. ● pur

Airin Sebut 80 Persen Sekolah di Tangsel Siap Belajar Tatap Muka

TANGERANG SELATAN (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) saat ini sedang mengkaji pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah untuk tahun ajaran baru.

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah melibatkan pertimbangan beberapa faktor.

“Jadi faktornya adalah kondisi pandemi Covid-19, apakah zonanya sudah aman, dan kesiapan sekolah juga menjadi faktor pertimbangan,” ujar Airin kepada wartawan, Selasa (6/4).

Pemkot Tangsel sendiri tengah mendistribusikan vaksin yang bisa diterima oleh tenaga pengajar, sehingga bisa menjadi indikator kesiapan guru untuk mempertimbangkan pelaksanaan belajar tatap muka.

Airin menambahkan Pemerintah Kota Tangsel juga telah melakukan langkah-langkah kesiapan. “Pertama, vak-

sinasi bagi tenaga pendidik terus dilakukan,” ujarnya.

Kedua, penyiapan sarana dan prasarana untuk menjalankan protokol kesehatan, dimana 80 persen sekolah negeri dan swasta di Kota Tangsel sudah memenuhi persyaratan.

Dengan begitu hal ini bisa mencegah kluster belajar tatap muka jika memang sudah dipakainya memang pada tahun ajaran baru belajar tatap muka di sekolah bisa diterapkan.

Dalam tahapan pelaksanaan, belajar tatap muka harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu.

Pertama, belajar tatap muka diselenggarakan di sekolah yang telah lolos verifikasi. Kedua, siswa yang hadir di sekolah hanya 50 persen dari total jumlah siswa. “Terakhir, harus ada izin dari orang tua. Inipun harus dilakukan setelah kondisi pandemi sudah memungkinkan untuk dilaksanakannya belajar tatap muka,” tandas Airin. ● pur



IDN/ANTARA

KENDALA PENCARIAN KORBAN BANJIR BANDANG DI NTT

Sejumlah warga mencari barang di sebuah rumah yang hancur akibat diterjang banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT, Selasa (6/4). Menurut Pemerintah Kabupaten Flores Timur, pencarian terhadap korban banjir bandang yang hilang terkendala akibat masih minimnya alat berat di Adonara.

Sandiaga: Larangan Mudik Berpotensi Untungkan Wisata Banten

“Pemerintah akan memastikan proses yang ketat dan disiplin, testing tracing dan treatment terakhir vaksinasi kita genjot supaya pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lokomotif untuk membangkitkan kita,” kata Sandiaga Uno.

SERANG (IM) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memprediksi wisata di kawasan pesisir Banten bisa ramai dampak dari larangan mudik. Ia pun meminta pariwisata mulai dari Anyer hingga Tanjung Lesung bisa menyiapkan protokol kesehatan dengan baik.

“Peniadaan mudik destinasi-destinasi di Banten akan

banyak mendapatkan limpahan kunjungan oleh karena itu disiplin protokol kesehatan dan semua destinasi harus menyiapkan toilet juga,” kata Sandiaga usai membuka dialog tentang ekonomi kreatif di Kota Serang, Selasa (6/4).

Sandiaga juga akan mendukung adanya destinasi alternatif seperti desa wisata. Ia pun berharap desa wisata bisa siap menerima kunjungan

wisatawan namun tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Pemerintah akan memastikan proses yang ketat dan disiplin, testing tracing dan treatment terakhir vaksinasi kita genjot supaya pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lokomotif untuk membangkitkan kita,” katanya.

Lebih jauh Sandiaga meminta pelaku wisata dan ekonomi kreatif berbenah di sisi protokol kesehatan. Warga yang biasanya ke arah timur, namun karena mudik dilarang bisa saja beralih ke daerah Barat seperti di pesisir Banten. “Jangan sampai ekonomi kreatif dituduh jadi klaster baru. Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah jawaban,” ujarnya.

Sandiaga juga berharap sektor pariwisata Banten bisa memberikan ruang tenaga

kerja untuk para penyandang disabilitas. Dalam kunjungan Sandi ke Serang terlihat sejumlah penyandang disabilitas ikut serta dalam barisan penari di sana.

Menurut Sandiaga, kehadiran penari disabilitas tersebut menjadi bukti terwujudnya pariwisata yang inklusif, berkualitas, berkelanjutan dan pariwisata yang berpihak kepada para penyandang disabilitas.

Kehadiran mereka pun dinilainya sebagai bentuk semangat atas kebangkitan sektor parekraf nasional. “Sekaligus ini sebagai penebar manfaat, semangat dan juga kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi,” tambahnya.

Bersamaan dengan hal tersebut, dirinya mendorong

adanya pembangunan infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Termasuk toilet umum yang menurutnya harus bersih dan layak serta mengakomodasi para penyandang disabilitas.

“Karena temen-temen disabilitas ini harus menjadi bagian daripada pariwisata, jadi atraksinya harus juga inklusif bagi temen-temen disabilitas. Termasuk juga pembukaan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk para penyandang disabilitas,” jelasnya.

Hal itu katanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menargetkan 1-2 persen dari penyandang disabilitas diberikan lapangan pekerjaan yang berkualitas oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. ● pur

FKUB Diharapkan Jadi Jembatan Strategis Gerakan Moderasi Beragama

TANGERANG (IM) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang diharapkan mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama.

“Selain itu, saya harap FKUB menjadi wadah resolusi konflik yang sangat efektif,” ujar Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin dalam keterangan tertulis saat membuka kegiatan Pelatihan Anggota dan Mitra FKUB Kota Tangerang secara virtual, Selasa (6/4).

Sachrudin meyakini, pelatihan yang digelar FKUB tersebut bisa menjadi wadah kesiapsiagaan dalam mencegah konflik yang mungkin bisa terjadi. “Dengan keberagaman yang ada, saya yakin melalui kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara kesiapsiagaan pencegahan konflik dengan membangun kesadaran dan saling menjaga serta menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama,” ujar Sachrudin.

Ia menjelaskan Kota Tangerang dikenal dengan penduduknya yang heterogen dengan suasana yang kondusif dalam kehidupan beragamanya. “Berkat peran tokoh atau pemuka agama di Kota Tangerang,

hingga kini kota kita menjadi kota yang kondusif dengan keanekaragaman umat beragama di dalamnya,” ujar Sachrudin.

Kegiatan pelatihan yang bekerja sama dengan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina tersebut turut menghadirkan peserta dari seluruh pemuka umat beragama dan fasilitator di Kota Tangerang.

Beberapa hari sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) juga menyebutkan, Provinsi Banten merupakan wilayah dengan masyarakat yang heterogen sejak masa Kesultanan Banten. Hingga saat ini situasi di Provinsi Banten cukup kondusif.

“Salah satu kelebihan Provinsi Banten, didukung oleh dua wilayah penegak hukum. Kepolisian dari Polda Banten dan Polda Metro Jaya, TNI dari Kodam Siliwangi dan Kodam Jayakarta,” kata WH saat menerima Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2021 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, (5/4). ● yy

Juni, Pemkot Cilegon Terima Penerimaan PPPK

CILEGON (IM) - Kabar gembira bagi para guru honorer. Pemkot Cilegon akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 pada Juni nanti.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Heri Mardiana memberikan bocoran seputar penerimaan PPPK 2021 Kota Cilegon. Pihaknya akan mulai membahas terkait penerimaan PPPK tersebut pasca-Lebaran nanti.

“Mei, setelah Lebaran, kami akan mulai membahas secara intens persiapan penerimaan PPPK dengan BKN,” kata Heri kepada wartawan, Selasa (6/4).

Heri menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat restu untuk menerima 643 formasi PPPK. Pihaknya memang mengajukan untuk mengakomodir tenaga guru honorer. Hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK, dimana status tenaga honorer akan dihapuskan pada 2023.

“Dalam PP 49 tahun 2018 kan mengatur itu. Kami menunggu kebijakan pusat untuk honorer di daerah. Karena dalam PP itu, pada 2023, sudah tidak boleh ada

honorer. Harapannya honorer daerah diangkat untuk PPPK,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, nasib sekitar 3 ribuan tenaga honorer di Cilegon memang belum jelas. Tetapi dengan aturan PP 49 2018 diharapkan tenaga honorer bisa diangkat seluruhnya.

“Kan kebutuhan pegawai di Pemkot Cilegon banyak. Kalau kami hilangkan honorer, bagaimana pelayanan ke masyarakat nanti, guru-guru juga terbatas. Mudah-mudahan pemerintah pusat memikirkan honorer daerah. Harapannya dengan lahir PP 49, ada kebijakan honorer diangkat secara utuh. Harapan daerah begitu,” tuturnya.

Terkait penerimaan, pendaftaran PPPK akan didahulukan dari penerimaan CPNS. Pendaftaran PPPK diperkirakan dibuka pada Mei 2021 dan baru setelahnya pendaftaran CPNS.

“Kalau tidak salah pendaftaran PPPK setelah Lebaran dan CPNS setelah perekrutan PPPK. Jedanya sekitar dua bulan lah, ada pemberitahuan dari pusat jadwal riilnya. Nanti kami akan diundang pusat, kami masih menunggu petunjuk dari Kemenpan RB dan BKN,” ucapnya. ● yan

Tingkatkan Kompetensi PKP dan DFI, Dinkes Kab Tangerang Gelar Bimtek

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan bimbingan teknis tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan pelatihan District Food Inspector (DFI) berbasis kompetensi tahun 2021, bertempat di Hotel Amaris Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas PKP Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pengawasan pangan industri rumah tangga maupun industri pangan siap saji.

Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Bidang Pelayanan Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Desi Tirtawati, S.Farm mengatakan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi petugas dalam rangka peningkatan pengawasan pangan, baik produksi maupun pendistribusian serta upaya

pembinaan dan advokasi kepada petugas di lapangan.

“Kegiatan hari ini kita melakukan pelatihan Bimtek untuk DFI dan PKP, karena kebetulan di kabupaten Tangerang tenaga DFI dan PKP kita masih terbatas maka kami memfasilitasi teman-teman perangkat daerah yg terkait dengan keamanan pangan, maupun teman di puskesmas untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui kegiatan bimtek ini,” ucap Desi dari nilis yang disampaikan IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang, Selasa (6/4).

Dengan adanya pengawasan yang baik serta dilakukan secara terus menerus dapat menciptakan makanan sehat dan bermutu sehingga makanan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tangerang bebas dari bahan berbahaya. Acara ini diselenggarakan tiga hari dari tanggal 5 sampai dengan 7 April 2021, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Dalam acara ini para peserta mendapatkan sertifikat berlabel SNI melalui ujian kompetensi.

Kegiatan pelatihan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari

20 orang tenaga DFI dan 10 orang tenaga PKP. Sebelum mengikuti kegiatan, para peserta wajib melakukan swab tes antigen untuk meminimalisir terjadinya penularan virus Covid-19.

Di saat yang bersamaan, Direktur CKP-CBT Center, Ratih Woro Anggraini berharap, semua peserta dapat memiliki kompetensi dan dapat menghasilkan bukti yang dipersyaratkan untuk membuktikan bahwa mereka memang berkompeten, karena hasilnya adalah sertifikat kelulusan pelatihan dan jika lulus dapat didaftarkan untuk menjadi peserta sertifikasi kompetensi untuk DFI dan PKP.

“Ke depannya ketika para pengawas dibekali dengan materi tentang pangan, mereka dapat melakukan pembinaan pengawasan ke lapangan mereka sudah lebih paham dan mengerti, karena mereka sudah bersertifikat dan sudah melalui uji kompetensi. Jadi hasilnya mudah-mudahan sudah lebih meningkat kualitas pengawasan dan pembinaan kita,” tutup Ratih. ● yan

Puskesmas Kalanganyar Tambah Imunitas Lansia

KALANGANYAR (IM) - Sebanyak 27 orang Lansia warga Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, mengikuti vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kalanganyar. Vaksinasi untuk lansia merupakan program pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Kepala Puskesmas Kalanganyar Rapi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi sudah berlangsung dari bulan Maret. “Mulai dari pelayanan publik sampai sekarang ke lansia. Selain lansia, pelayanan publik yang mau vaksin masih kami layani,” katanya kepada wartawan di Puskesmas Kalanganyar di Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Selasa (6/4).

Lansia yang menjalani vaksinasi berusia 60 tahun ke atas. “Bagi warga usianya sudah 60 tahun ke atas maka kami tunggu di Puskesmas Kalanganyar untuk vaksinasi. Kami siap melayani setiap hari kerja, adapun jadwal rutin vaksinasi setiap hari Senin dan Kamis,” katanya.

Pelayanan vaksinasi kepada lansia dimulai dari semenjak hari Senin, 5 April 2021. “Sekarang ini hari ke 2, lansia sudah divaksin sebanyak 27 orang,” katanya.

Ia mengungkapkan, syarat vaksinasi ialah membawa KTP dengan domisili tentunya Warga Kecamatan Kalanganyar. “Pelayanan vaksinasi di hari lain selain Senin dan Kamis kami layani ketika memang situasional,” katanya.

Lenih jauh Rapi menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi bagian upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Dengan harapan setelah divaksinasi masyarakat punya imunitas terhadap Covid-19. Sehingga seandainya terkenali Covid 19 masyarakat sudah kuat tidak menjadikannya masalah,” katanya.

Camat Kalanganyar Cece Saputra menyambut baik pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kalanganyar. “Saya mengajak kepada semua warga khususnya kepada lansia agar jangan takut dengan vaksinasi. Jangan takut karena vaksinasi ini merupakan suplemen untuk menambah daya imun tubuh lebih kuat,” katanya. ● yy



IDN/ANTARA

PENJUALAN BUSANA MUSLIM MULAI MENINGKAT

Pedagang memasangkan baju muslim ke manekin di sebuah toko di pusat perbelanjaan, Pekanbaru, Riau, Selasa (6/4). Pedagang busana muslim tersebut mengaku sepekan menjelang Ramadan penjualan perlengkapan muslim seperti baju koko, peci, sarung, mukena dan sajadah mulai mengalami peningkatan hingga 40 persen dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya.



IDN/ANTARA

BUDI DAYA KURMA DI PONDOK PESANTREN

Pengasuh Pondok Pesantren Pari Ulu, Mustain Anshori melakukan panen perdana kurma jenis degled noor di kawasan Pondok Pesantren Pari Ulu, Kediri, Jawa Timur, Selasa (6/4). Pondok Pesantren Pari Ulu melakukan budi daya berbagai jenis kurma pada lahan seluas dua hektare yang diproyeksikan sebagai agrowisata.

DUA TAHUN TANPA APBD

Pemkab dan DPRD Jember Akhirnya Sahkan APBD 2021 Rp4,4 Triliun

JEMBER (IM) - Jember akhirnya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebagai hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif. Raperda APBD 2021 itu disahkan menjadi Perda APBD 2021 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Jember hingga Senin (5/4) pukul 23.00 WIB. Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut, APBD Jember hanya dalam bentuk Perkada atau sepihak ditentukan oleh bupati.

“Akhirnya kita bisa memiliki APBD. Ini tidak lepas dari kesungguhan teman-teman DPRD untuk membahasnya bersama. Kami sangat apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Jember,” kata Bupati Jember, HENDY Siswanto, Selasa (6/4).

Dia berharap, APBD 2021 ini bisa kembali memutar roda perekonomian Jember yang lesu selama beberapa waktu terakhir. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah pembenahan infrastruktur.

“Anggaran ini memang fokus pada infrastruktur. Tetapi hanya di jalan dan jembatan sehingga belum mengcover secara keseluruhan. Ada pekerjaan infrastruktur pengairan dan pertanian. Kita punya DAM (saluran air pertanian) yang masih butuh perbaikan. Insya Allah tahun depan akan kita sempurnakan,” ujarnya.

APBD Jember 2021 dibahas bersama DPRD hanya dalam waktu sekitar satu minggu. Hendy menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Angga-

ran—Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA—PPAS) ke DPRD Jember pada Senin (29/3) pekan lalu.

Penyerahan dokumen itu menandai dimulainya pembahasan bersama antara DPRD Jember dengan jajaran Pemkab. Sejak itu, selama sepekan, rapat-rapat di DPRD digelar hingga larut malam, bersama jajaran eksekutif untuk menyelesaikan target pengesahan APBD Jember 2021.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syaqui meminta, agar semangat kerja lembur diteruskan hingga pembelanjaan. Hal ini karena kondisi Jember yang berbeda dengan daerah sekitarnya, yaitu belanja APBD baru dimulai pada bulan April, bukan Januari.

“Saya mengerti betul, waktu input anggaran kemarin, pegawai Pemkab bekerja keras selama 36 jam non stop. Saya ingin semangat itu dipertahankan, akselerasi dari bulan April sampai Desember itu berat,” terangnya.

Dia mengingatkan, pejabat Pemkab Jember yang tidak bisa bekerja cepat bisa segera diganti. Sebab, seluruh pejabat Pemkab Jember saat ini berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Saya minta kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat agar semangat menyusun APBD ini tetap dipertahankan dalam realisasi anggaran. Jadi siap-siap saja, pejabat yang tidak bisa bekerja, tiga bulan ini bisa diganti,” tutup politikus PKB ini. ● pra